

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Pengertian Budaya Politik

1. Pengertian Budaya Politik

Menurut Eduardus Eko (2015, hlm. 1-2 dalam *Jurnal Aspirasi Vol. 5*)

“Budaya politik merupakan aspek yang sangat signifikan dalam sistem politik. Hal ini dikarenakan bekerjanya struktur dan fungsi politik dalam suatu sistem politik sangat ditentukan oleh budaya politik yang melingkupinya”.

Menurut Budi Winarno (2008, hlm.65 dalam *Sistem Politik Indonesia Era Reformasi*).

“Dalam konteks sistem politik Indonesia, memposisikan budaya politik sebagai satu dari sekian jenis lingkungan yang mengelilingi, mempengaruhi, dan menekan sistem politik, bahkan yang dianggap paling intens dan mendasari sistem politik”.

Menurut Rusandi Kantaprawira (2006, hlm. 36 dalam *Sistem Politik Indonesia*)

Budaya politik adalah mengkonstatasi salah satu parameter pembangunan politik Indonesia adalah tercapainya keseimbangan atau harmoni budaya politik dengan pelebagaan politik yang ada atau akan ada. Berpijak dari paparan di atas, tulisan ini mencoba untuk memberikan gambaran mengenai budaya politik Indonesia untuk mengenal atribut atau ciri yang terpokok untuk menguji proses orientasi yang bersifat kognitif menyangkut pemahaman dan keyakinan individu terhadap sistem politik dan atributnya, seperti tentang ibukota negara, lambang negara, kepala negara, batas-batas negara, mata uang yang dipakai, dan lain sebagainya. Sementara itu orientasi yang bersifat afektif menyangkut ikatan emosional yang dimiliki oleh individu terhadap sistem politik. Jadi menyangkut feeling terhadap sistem politik. Sedangkan orientasi yang bersifat evaluatif menyangkut kapasitas individu dalam rangka memberikan penilaian

terhadap sistem politik yang sedang berjalan dan bagaimana peranan individu di dalamnya. Struktur-struktur yang umum dalam sistem politik adalah kelompok-kelompok kepentingan, partai-partai politik, badan legislatif, eksekutif, birokrasi, dan badan-badan peradilan yang berlanjut maupun yang berubah, seiring dengan proses perubahan dan perkembangan politik masyarakat di masa konsolidasi demokrasi saat ini.

2. Tipe – tipe Budaya Politik

Dalam jurnal (JURNAL ASPIRASI Vol. 5 No.2 Februari 2015: hlm.3-6)

Gabriel Almond dan Sidney Verba (1963) mengklasifikasikan tipe-tipe kebudayaan politik sebagai berikut:

Budaya politik parokial (*parochial political culture*) yang ditandai dengan tingkat partisipasi politik masyarakat yang sangat rendah. Hal ini disebabkan faktor kognitif, misalnya tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, Budaya politik subyek (*subject political culture*) di mana anggota-anggota masyarakatnya memiliki minat, perhatian, mungkin pula kesadaran terhadap sistem secara keseluruhan, terutama terhadap output-nya, namun perhatian atas aspek input serta kesadarannya sebagai aktor politik, boleh dikatakan nol dan budaya politik partisipan (*participant political culture*) yang ditandai oleh adanya perilaku bahwa seseorang menganggap dirinya ataupun orang lain sebagai anggota aktif dalam kehidupan politik sehingga menyadari setiap hak dan tanggungjawabnya (kewajibannya) dan dapat pula merealisasi dan mempergunakan hak serta menanggung kewajibannya.

Menurut Almond (1956, hlm. 44 dalam *Teori Sistem Politik Struktural Fungsional*)

Namun demikian, dalam suatu masyarakat kerap kali ditemukan inklinasi kepada salah satu tipe budaya politik, misalnya, dalam budaya politik partisipan masih dapat dijumpai individu-individu yang tidak menaruh minat pada obyek-obyek politik secara luas. Menyadari realitas budaya politik yang hidup di masyarakat tersebut, Almond menyimpulkan adanya budaya politik campuran (*mixed political culture*) yang menurutnya lazim terjadi pada masyarakat yang senantiasa mengalami perkembangan dan dinamika yang pesat, sehingga sistem politik bisa berubah dan kultur serta struktur politik senantiasa tidak selaras.

Budaya politik campuran (mixed political culture) yang dikemukakan Almond sebagai berikut:

- a. Budaya Parokial-Subjek (The Parochial-Subject Culture) Tipe budaya politik saat sebagian besar penduduk menolak tuntutan-tuntutan eksklusif masyarakat suku yang feodalistik. Masyarakatnya mengembangkan kesetiaan terhadap sistem politik yang lebih kompleks dengan struktur-struktur pemerintahan pusat yang sentralistis.
- b. Budaya Subyek-Partisipan (The Subject-Participant Culture) Proses peralihan dari budaya subyek menuju budaya partisipan yang sangat dipengaruhi oleh cara bagaimana peralihan budaya parokial menuju budaya subyek. Dalam budaya subyekpartisipan ini, sebagian besar penduduk telah memperoleh orientasi-orientasi input yang bersifat khusus dan serangkaian orientasi pribadi yang aktif; sementara sebagian penduduk masih terorientasi dengan struktur kekuasaan yang otoriter dan menempatkan partisipasi masyarakat pasif.
- c. Budaya Parokial-Partisipan (The Parochial-Participant Culture) Kondisi ini biasanya terjadi di dalam negara yang sedang berkembang. Hampir seluruh negara berkembang memiliki budaya parokial. Karenanya sistem politik mereka terancam oleh fragmentasi parokial yang tradisional, padahal mereka ingin secepatnya menjadi sebuah negara modern. Suatu masa, cenderung ke otoritarianisme dan pada waktu yang lain ke arah demokrasi.
- d. Budaya Parokial-Subyek-Partisipan (Civic Culture) Civic culture (budaya kewarganegaraan) menekankan pada partisipasi rasional dalam kehidupan politik, digabungkan dengan adanya kecenderungan politik parokial dan subyek warganegara maka menjadikan sikap-sikap tradisional dari penggabungannya dalam orientasi partisipan yang mengarah pada suatu budaya politik dengan keseimbangan aktivitas politik, Esensi konsolidasi demokrasi menurut Larry Diamond adalah terbentuknya suatu perilaku dan sikap, baik di tingkat elite maupun massa yang mencakup dan bertolak dari metode dan prinsip-prinsip demokrasi. Sedangkan menurut Laurence Whitehead, konsolidasi demokrasi mencakup peningkatan secara prinsipil komitmen seluruh elemen masyarakat pada aturan main demokrasi, keterlibatan dan adanya rasionalitas serta kepasifan, tradisionalitas, dan komitmen terhadap nilai-nilai parokial. Singkatnya, budaya politik ini merupakan penggabungan karakteristik dari ketiga budaya politik murni. Dalam pemahaman yang lebih sederhana, budaya politik kewarganegaraan merupakan kombinasi antara karakteristik-karakteristik aktif, rasional,

mempunyai informasi yang cukup mengenai politik, kesetiaan pada sistem politik, kepercayaan dan kepatuhan terhadap pemerintah, keterikatan pada keluarga, suku, dan agama.

3. Pengertian Politik

Menurut Miriam Budiarmo (Miriam Budiarmo; Dasar-Dasar Ilmu Politik, dalam buku suntingan Toni Adrianus Pito, Kemal Fasyah, dan Efriza; Mengenal Teori-teori Politik, Cetakan Pertama, Depok, 2005, hlm 8) sebagai berikut :

Menurut Miriam Budiarmo politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu system politik atau Negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan system itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Pengambilan keputusan mengenai apakah yang menjadi tujuan dari system politik itu menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah dipilih itu. Untuk melaksanakan tujuan-tujuan itu tentu diperlukan kebijakan-kebijakan umum yang menyangkut pengaturan dan atau alokasi dari sumber-sumber resources yang ada Untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan itu, perlu dimiliki kekuasaan dan kewenangan, yang akan dipakai baik untuk membina kerja sama maupun untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam.

Menurut (dalam buku karya SP.Varma; Teori Politik Modern, dalam buku suntingan Toni Adrianus Pito, Kemal Fasyah, dan Efriza; (2005, hlm. 3) Mengenal Teori-teori Politik, sebagai berikut :

Konsep-konsep yang dibahas dalam teori politik mencakup antara lain masyarakat, kelas social, Negara, kekuasaan, kedaulatan, hak dan kewajiban, kemerdekaan, lembaga-lembaga Negara, perubahan social, pembangunan politik, modernisasi, dan sebagainya. (Miriam Budiarmo; Dasar-Dasar Ilmu Politik, dalam buku suntingan Toni Adrianus Pito, Kemal Fasyah, dan Efriza; Mengenal Teori-teori Politik, Cetakan Pertama, Depok, 2005, hal 3) Sedangkan menurut Germino, teori politik sebagai “studi kritis tentang prinsip-prinsip pengaturan yang benar dalam eksistensi social manusia.”Jadi teori politik itu sebuah “ilmu” tapi bukan ilmu yang membatasi diri pada kata-kata yang dapat dibuktikan dengan panca indera. Sebagai ilmu, teori politik meliputi pengetahuan fakta dan pengertian tentang cara pengetahuan ini diserap dan dinilai. Ilmu Politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat, dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan

keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.

B. Kesadaran dan Kemampuan Sistem Politik

1. Pengertian Kesadaran Politik

Menurut Ruslan (2000, hlm. 94)

“Kesadaran politik merupakan berbagai bentuk pengetahuan, orientasi, dan nilai-nilai yang membentuk wawasan politik individu, ditinjau dari keterkaitannya dengan kekuasaan politik”.

Menurut Surbakti dalam Miriam Budiarjo (2007, hlm. 144 dalam *Dasar-dasar Ilmu Politik*),

“Kesadaran politik adalah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. tingkat kesadaran politik diartikan sebagai tanda bahwa warga masyarakat menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan dan atau pembangunan”.

Menurut Budiyanto (2006, hlm. 185),

“Kesadaran politik adalah suatu proses batin yang menampakkan keinsyafan dari setiap warga negara akan *urgensi* urusan kenegaraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kesadaran politik atau keinsyafan hidup bernegara bersifat menyeluruh dan kompleks sehingga tanpa dukungan positif dari seluruh warga masyarakat, tugas-tugas negara banyak yang terbengkalai”.

Dari beberapa pengertian kesadaran politik dapat disimpulkan bahwa kesadaran adalah pemahaman atau pengetahuan seseorang tentang dirinya dan keberadaan dirinya untuk dapat memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapinya.

2. Unsur-Unsur Kesadaran Politik

Menurut Ruslan (2000, hlm. 96) ada beberapa cara dalam mencapai kesadaran politik yang melalui beberapa hal yaitu:

- a. Arahan politik secara langsung, baik melalui jalur formal maupun non formal, melalui penjelasan-penjelasan politik, usaha-usaha bimbingan, dan pengajaran pendidikan politik langsung, yang dilakukan oleh para pemikir dan pemimpin politik.
- b. Pengalaman politik yang didapatkan dari partisipasi politik.

- c. Kesadaran yang muncul dari belajar secara mandiri. Misalnya membaca koran dan buku-buku tentang politik, serta mengikuti berbagai peristiwa.
- d. Kesadaran yang lahir melalui dialog-dialog kritis.
- e. Ditambah dengan kesadaran politik yang merupakan hasil dari dua metode, yaitu *apprenticeship* dan generalisasi. Maka seluruh metode ini akan mengantarkan seseorang untuk mendapatkan kesadaran politik.

3. Cara-Cara untuk Mencapai Kesadaran Politik

Menurut Ruslan (2000, hlm. 97-98)

Kesadaran politik dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor yang memengaruhi kesadaran politik yang terpenting di antaranya adalah:

- a. Jenis kultur politik di mana individu itu tumbuh darinya atau dengan kata lain, tabiat kepribadian politik yang terbentuk darinya.
- b. Berbagai revolusi dan perubahan budaya yang terjadi di masyarakat.
- c. Berbagai kemampuan dan kecakapan khusus yang dimiliki individu, juga tingkat pendidikannya. Adanya pemimpin politik/sejumlah tokoh politik yang mampu memberikan arahan politik kepada masyarakat luas.

4. Indikator Kesadaran Politik

Menurut Soekanto (1982, hlm. 125)

“Terdapat empat indikator kesadaran yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya dan menunjuk pada tingkat kesadaran tertentu, mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi, antara lain: pengetahuan, pemahaman, sikap, dan pola perilaku (tindakan)”.

Menurut Notoatmodjo (2003, hlm. 121)

“Pengetahuan merupakan hasil tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui pancaindra manusia yakni: penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Pengetahuan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan akan menentukan corak dan arah suatu keputusan yang akan diambil”.

Menurut Arman (2002, hlm. 427)

“Pemahaman adalah sesuatu hal yang seseorang pahami dan mengerti dengan benar, sehingga dapat diartikan bahwa pemahaman adalah suatu proses, cara memahami, cara mempelajari sesuatu dengan baik supaya paham, dan memiliki pengetahuan. Pemahaman adalah hasil dari kemampuan menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi tersebut dengan benar”.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dari itu pengetahuan dan pemahaman penting dalam politik demokrasi dan pemilihan kepala desa. Karena, sebagai warga negara atau sebagai individu tentunya minimal mengetahui dan memahami mengenai masalah-masalah atau isu-isu yang bersifat politis, dengan seperti itu akan mampu meningkatkan kualitas diri dalam berpolitik atau pengetahuan dalam berpolitik.

Menurut Notoatmodjo (2003, hlm. 124)

“Sikap adalah sekumpulan respon yang konsisten terhadap obyek sosial. Dan merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseorang terhadap stimulus atau obyek. Sikap adalah kesiapan atau kesiapan untuk bertindak yang terdiri dari menerima, merespon, menghargai, dan bertanggung jawab terhadap suatu objek. Sedangkan tindakan adalah sesuatu yang dilakukan atau perbuatan. Sikap dan tindakan politik juga penting dalam politik demokrasi dan pemilihan kepala desa karena lebih menyadari akan tanggung jawabnya sebagai warga negara yang menentukan masa depan bangsa”.

Kesadaran politik menyangkut pengetahuan, minat, dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik. Kesadaran politik atau keinsyafan bernegara menjadi penting dalam kehidupan kenegaraan, mengingat tugas-tugas negara bersifat menyeluruh dan kompleks. Karena itu tanpa dukungan positif dari seluruh warga masyarakat akan banyak tugas negara yang terbengkalai.

Menurut Subakti (2007, hlm. 144)

“Aspek kesadaran politik seseorang yang meliputi kesadaran terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara. Misalnya hak-hak politik, hak ekonomi, hak mendapat perlindungan hukum, hak mendapatkan jaminan sosial, dan kewajiban-kewajiban seperti kewajiban dalam sistem politik, kewajiban kehidupan sosial, dan kewajiban lainnya”.

5. Kemampuan Sistem Politik

Dalam jurnal (JURNAL ASPIRASI Vol. 5 No.2 Februari 2015: hlm.3-6)

Gabriel Almond dan Sidney Verba (1963 Menjelaskan bahwa:

Kemampuan sistem politik yang masuk ke dalam proses perubahan sistem merupakan suatu fakta, bahwa kemampuan untuk terus bertahan dengan sistem politik yang ada merupakan sebuah keniscayaan. Tekanan terhadap sistem politik dapat saja disebabkan oleh perubahan yang datang dari dalam negeri maupun yang datang dari luar negeri. Sebagai bagian dari sistem yang luas, sistem politik Indonesia akan selalu mendapat pengaruh dari sistem politik di luar negeri. Hal ini tidak hanya disebabkan oleh suatu tuntutan terhadap perubahan, tetapi yang paling penting adalah kemampuan dari sistem politik itu sendiri dalam menjawab dan mempertahankan kehidupan berbangsa dan bernegara secara baik. Persoalan biasanya terletak pada kekuatan dari suatu sistem politik untuk mengatasi berbagai desakan dan tuntutan terhadap perubahan yang kurang memadai. Suatu sistem politik yang kuat dapat menghadapi berbagai tekanan politik, baik yang muncul dari sistem politik itu sendiri maupun tekanan yang datang dari luar sistem politik tersebut. Tekanan terhadap sistem politik akan berjalan terus-menerus, dari suatu periode kepada periode berikutnya. Indonesia sebagai negara yang menganut sistem politik terbuka akan banyak mendapat pengaruh dan harus mampu mengikuti irama perubahan. Sistem politik di China yang sebelumnya sangat tertutup sekarang berusaha membuka diri kendatipun terkesan sangat hati-hati dan sedikit demi sedikit. Kemampuan China dalam menata sistem politiknya dapat dijadikan sebagai model yang baik, sehingga lebih memperhatikan sistem politik yang ada di dalam negeri. Walhasil China dapat menyesuaikan diri dengan perubahan sistem politik yang terjadi di luar negeri. Pada sisi yang lain, sistem politik yang ada di Amerika Serikat selalu berusaha untuk memberikan warna ideologi terhadap negara yang lainnya. Setiap negara lain yang berbeda keinginan dengan Amerika Serikat selalu dianggap tidak demokratis menurut pandangan Amerika Serikat. Sebagai contoh, pemilu yang dilaksanakan di Iran dengan memilih presiden secara langsung, demikian juga kemenangan Hamas dalam pemilu di Palestina dianggap tidak demokratis karena Amerika Serikat menggunakan cara pandang menurut kepentingan negaranya sendiri. Akibatnya proses demokratis yang terjadi di dua negara tersebut

dianggap sebagai ancaman terhadap tatanan dunia, tidak lain karena kemenangan Hamas dalam pemilu Palestina dan kemenangan Mahmud Ahmad Dinejad dalam pemilu Presiden Iran yang tidak dikehendaki oleh Amerika Serikat. Kekuatan sistem politik yang ada di suatu negara dapat diangkat melalui kekuatan sendiri dengan cara menggali potensi yang ada pada negara tersebut. Kemampuan internal sistem politik berguna untuk membentengi diri, baik dari dalam maupun dari luar. Tekanan yang datang dari dalam maupun dari luar mempunyai kekuatan yang sama, karena itu diperlukan kemampuan sistem politik untuk mempertahankan dirinya. Dalam hal ini Juliansyah mengatakan bahwa tekanan yang datang dari dalam negeri biasanya lebih pada perubahan yang diinginkan oleh warga masyarakat untuk memenuhi keinginan dan tuntutan yang lebih baik, akan tetapi membawa dampak negatif bilamana perubahan tersebut tidak memiliki arah yang jelas terhadap perubahan yang diinginkan.¹ Berdasarkan pendapat di atas tampak jelas bahwa tekanan dari dalam negeri lebih disebabkan oleh adanya keinginan untuk mencapai perubahan, sementara tekanan dari luar negeri lebih mengarah pada kepentingan negara asing lengkap dengan agenda perubahan sesuai dengan kepentingan negara asing yang membawa agenda perubahan tersebut.

6. Praktik politik buruk di Indonesia

Dalam negara demokrasi modern, pelaksanaan kedaulatan rakyat diselenggarakan secara langsung melalui sistem pemilihan umum. Di Indonesia sendiri, pemilu dianggap sebagai sarana yang efektif dan tepat untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Indonesia bukanlah bangsa yang baru dalam pelaksanaan proses transisi politik ini. Sejak tahun 1955 hingga kini, bangsa Indonesia telah berkali-kali melaksanakan praktik pemilihan umum yang bertujuan melakukan proses transisi politik dalam kerangka sistem demokrasi yang dianutnya. Reformasi di akhir tahun 90-an yang kemudian diikuti dengan Perubahan UUD 1945 berdampak pada berubahnya sistem pemilihan umum, baik pemilihan anggota legislatif maupun Pelaksanaan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung dengan memberikan hak kepada setiap warga negara untuk memilih perwakilannya di DPR, DPRD dan DPD serta berhak memilih langsung pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pemilu legislatif secara langsung mulai dilaksanakan pada

tahun 1999, 2004, dan 2009 sedangkan pemilu presiden secara langsung baru dilaksanakan pada tahun 2004 dan 2009. Apabila bercermin dari pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia sebagai gambaran dari praktik politik bangsa, maka tidak akan terlepas dari pelaksanaan penyelesaian perselisihan-perselisihan dan konflik-konflik yang timbul dalam proses pemilihan umum tersebut. Perselisihan hasil pemilihan umum merupakan salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan apa yang diamanatkan konstitusi sebagai lembaga yang mengawal proses demokrasi tersebut. Proses demokrasi bagaimanapun juga harus dikawal oleh hukum yang konstitusional sebagai salah satu syarat negara hukum. Sejak pemilu legislatif dan pemilu presiden tahun 2004, Mahkamah Konstitusi telah memutus puluhan bahkan ratusan perkara perselisihan pemilu legislatif. Demikian pula ketika Undang-Undang melimpahkan penyelesaian perselisihan pemilu kepada MK pada tahun 2008, lebih dari 80% pelaksanaan pemilu langsung baik dari tingkat kabupaten/kota maupun tingkat provinsi dibawa ke persidangan Mahkamah Konstitusi sebagai perkara perselisihan hasil pemilu (PHPU).

Fakta yang ditemukan baik di dalam maupun yang terjadi di luar proses persidangan di MK menunjukkan bahwa proses pemilihan langsung tersebut diwarnai oleh berbagai pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan baik oleh aparat pemerintah maupun para pelaku politik itu sendiri, yang salah satunya disebabkan oleh praktik politik yang buruk. Peliknya permasalahan ini tergambar dari beberapa putusan PHPU Mahkamah Konstitusi yang mengindikasikan telah terjadinya pelanggaran-pelanggaran Pemilu yang bersifat sistematis, massif dan terstruktur yang jelas-jelas menghambat terlaksananya pemilu yang berasaskan langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil. Dalam Pemilu, perilaku para pelaku politik maupun pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pemilu ini merupakan salah satu faktor penyebab timbulnya berbagai

penyimpangan. Seringkali para calon kepala daerah lebih berorientasi untuk mengejar dan mempertahankan kekuasaan daripada menyusun sebuah program kerja yang visioner dan berorientasi kepada perbaikan kondisi sosial masyarakat. Agenda pemilukada menjadi ajang untuk mengejar posisi kepala daerah sebagai sebuah profesi yang menguntungkan, bukan sebagai sebuah tanggungjawab, sehingga orientasinya lebih mengarah kepada profit, yaitu bagaimana mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dari posisi politik tersebut. Dalam proses kampanye, para peserta pemilu lebih suka melakukan upaya menarik simpati pemilih melalui cara yang instan seperti melakukan praktik politik uang (*money politic*) dengan cara membagi-bagikan uang atau menjanjikan sejumlah uang, barang atau fasilitas kepada masyarakat calon pemilih. Calon kepala daerah yang memiliki pengaruh atau posisi dalam pemerintahan seringkali secara sadar menggunakan posisinya tersebut untuk mendapatkan dukungan atau melakukan intimidasi untuk menekan pihak-pihak yang lemah, seperti seorang pejabat pemerintah yang menekan bawahannya untuk mendukung peserta pemilu tertentu. Lebih jauh lagi, kadangkala peserta tersebut menggunakan dana APBN atau fasilitas negara sebagai sarana untuk mencapai kemenangan secara curang. Pelanggaran-pelanggaran lain seperti pengerahan massa, penyuapan penyelenggara pemilu, manipulasi data hingga premanisme juga mewarnai berbagai proses pemilukada di berbagai daerah menunjukkan buruknya praktik politik kita.

Dalam praktik pemilukada di Indonesia, uang dan kekuasaan merupakan dua alat yang paling diperebutkan. Uang dan kekuasaan merupakan sarana untuk mencapai kemenangan pemilu secara instan. Hal ini akan menjadi persoalan karena sumber keuangan yang ada di Indonesia adalah berasal dari keuangan negara dan pengusaha. Masyarakat kelompok menengah yang menjadi mayoritas penduduk Indonesia belum mampu berpartisipasi/sukarela memberikan sumbangan dana untuk mendukung para kontestan pemilu. Akibatnya

para kontestan pemilu mempergunakan sumber keuangan negara dan pengusaha untuk membiayai kampanye politiknya. Penggunaan dana kampanye yang bersumber dari pengusaha merupakan hal yang berbahaya karena pada akhirnya akan menimbulkan politik kartel, dimana kontestan pemenang pemilu yang menjabat sebagai wakil-wakil rakyat tidak akan dapat membela kepentingan rakyat yang diwakilinya secara maksimal. Kontestan pemenang pemilu tersebut akan terbentur dengan kepentingan para pengusaha yang memberinya dana kampanye, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambilnya hanya akan mewakili kepentingan-kepentingan pengusaha penyandang dana kampanyenya. Dari sini terlihat bahwa masyarakat banyak di Indonesia sebagai penopang utama demokrasi hanya dijadikan objek politik, mereka hanya diperhitungkan sebagai angka numerik perolahan suara untuk mencapai kemenangan kontestan politik. Masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia belumlah menjadi subjek politik yang seharusnya didengar aspirasinya dan diwakili suaranya setelah pesta demokrasi itu usai.

Perilaku politik para elit politik peserta Pemilu ini tentunya juga memengaruhi perilaku politik masyarakat pada umumnya. Masyarakat semakin menerima penyimpangan-penyimpangan dalam pemilu sebagai sebuah kewajaran, sehingga menjadi permisif terhadap hal tersebut. Pengerahan massa dan kerusuhan kemudian menjadi pemandangan sehari-hari dalam proses pemilukada, bahkan penolakan hasil pemilukada pun cenderung diwujudkan dalam bentuk intimidasi, kekerasan, dan pengerahan massa. Praktik politik uang, intimidasi, maupun pengerahan massa tentunya tidak akan terjadi dalam cakupan yang luas apabila masyarakat melakukan penolakan dan apabila fakta kemudian menunjukkan praktik penyimpangan tersebut tidak memunculkan hasil yang diharapkan. Dalam masyarakat yang permisif seperti ini sulit diharapkan timbulnya politik bersih dalam pelaksanaan demokrasi. Jika kondisi dan praktik politik buruk ini dibiarkan, maka

akan tumbuh menjadi budaya politik yang buruk dan membahayakan kelangsungan sistem pemerintahan demokrasi yang dianut

7. Budaya Politik Bersih di Indonesia

Budaya merupakan salah satu variabel penting dalam sistem politik. Konsep suatu sistem politik harus memperhatikan variabel budaya didalamnya agar sistem tersebut sesuai dan mampu menggambarkan nilai-nilai dasar dan karakteristik masyarakat wilayah tersebut. Budaya memainkan perannya dalam membentuk perilaku kolektif sebuah komunitas politik. Setiap masyarakat memiliki nilai-nilai dasar dan karakteristik yang berbeda-beda satu sama lain, sehingga masyarakat juga memiliki budaya politik yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Budaya politik sebagai suatu sikap orientasi yang khas dari warga negara bersumber dari akar budaya politik yang merupakan wujud sintesa peristiwa-peristiwa sejarah yang telah mengkristal dalam kehidupan masyarakat dan diwariskan turun temurun berupa tatanan nilai dan norma perilaku. Di Indonesia, nilai-nilai itu merupakan nilai-nilai dasar yang meskipun berbeda-beda namun tidak bertentangan satu sama lain. Nilai itu berasal dari nilai-nilai masyarakat-masyarakat adat yang ada di seluruh Negara Indonesia yang kemudian dirangkum dan disatukan dalam Pancasila sebagai dasar negara. Dengan demikian akar budaya tersebut secara keseluruhan dapat dilihat dalam Pancasila. Setiap sila dalam Pancasila mengandung nilai-nilai yang memiliki makna mendalam. Prinsip-prinsip (nilai) dasar dalam Pancasila adalah prinsip Ketuhanan yang menjadi elemen paling utama dari elemen negara hukum Indonesia, prinsip musyawarah, keadilan sosial serta hukum yang tunduk pada kepentingan nasional dan persatuan Indonesia yang melindungi segenap tumpah darah Indonesia, prinsip keadilan sosial, dan prinsip terakhir negara hukum Indonesia adalah elemen dimana hukum mengabdikan pada kepentingan Indonesia yang satu dan berdaulat yang melindungi seluruh tumpah darah Indonesia.

C. Tinjauan Partai Politik

1. Pengertian Partai Politik

Menurut dalam Muhammad Ali Syafa'at (2011, hlm. 30) menjelaskan tentang partai politik sebagai berikut :

“Pengertian partai politik secara etimologis menurut Jimly Assiddiqie berasal dari kata *part* yang berarti bagian atau golongan. Kata partai menunjuk pada golongan sebagai pengelompokan masyarakat berdasarkan kesamaan tertentu seperti tujuan, ideologi, agama, atau bahkan kepentingan. Pengelompokan itu berbentuk organisasi secara umum, yang dapat dibedakan menurut wilayah aktivitasnya, seperti organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, serta organisasi politik. Dalam perkembangannya, kata partai lebih banyak diasosiasikan untuk organisasi politik, yaitu organisasi masyarakat yang bergerak di bidang politik”

Menurut Miriam Budiardjo (2008, hlm.403 *Dasar-dasar Ilmu Politik*)

“Partai politik merupakan suatu kelompok yang terorganisasi yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan yang dimaksud dalam pengertian ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik atau merebut kedudukan politik secara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan umum”.

Menurut Undang-undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

“Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Definisi partai politik”.

Menurut Carl J. Friedrich dalam Miriam Budiardjo (2008 hlm.404) adalah:

“Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil secara materiil. (*A political, party is a group of human beings, stably organized with the objective of securing or maintaining for its leaders control of a government, with the further objective of giving to members*

of the party, through such control ideal and material benefits and advantages”.

Menurut Sigmund Neumann dalam Miriam Budiardjo (2008, hlm. 404)

“Partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda (*A political party is the articulate organization of society's active political agents; those who are concerned with the control of governmental polity power, and who compete for popular support with the other group or groups holding divergent views*)”.

Menurut Cheppy Haricahyono dalam Miriam Budiardjo (1991, hlm.189 *Dalam Dasar-Dasar Ilmu Politik*).

Partai politik merupakan organisasi politik yang memiliki ideologi dan cita-cita tertentu yang ingin diraih secara bersama-sama dan memiliki tujuan untuk merebut dan atau mempertahankan kekuasaan dengan cara bersaing dalam pemilu untuk menduduki jabatan-jabatan publik. Partai politik merupakan keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokratis. Sebagai suatu organisasi, partai politik secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara absah (*legitimate*) dan damai. Partai politik merupakan salah satu prasyarat bagi negara yang merdeka dan berdaulat. Partai politik tidak saja sebagai salah satu sarana penyalur aspirasi rakyat kepada pemerintah negaranya, akan tetapi partai politik sekaligus terlibat dalam proses penyelenggaraan negara melalui wakil-wakilnya yang duduk dalam berbagai lembaga negara yang ada di negara-negara yang sudah maju, terutama negara Barat, persaingan untuk memperoleh suara dalam pemilihan yang bebas dan bersifat nasional dianggap sebagai alternatif terbaik untuk menentukan figur pemimpin politik yang mempunyai tanggungjawab terhadap pemilihnya sehingga partai politik tidak dapat dipisahkan dengan alternatif tersebut. Dengan demikian, partai politik bertindak sebagai instrumen perwakilan dan sarana untuk menjamin pergantian pemerintahan secara teratur dan tanpa pergolakan yang dapat menghancurkan keseluruhan sendi-sendi masyarakat dan negara yang sudah mapan. Tetapi perlu diingat bahwa dalam masyarakat yang

demikian ini partai politik muncul ketika persoalan identitas nasional telah teratasi dan legitimasi lembaga-lembaga pemerintahan telah mengakar kuat. Berbeda dengan perkembangan partai-partai di banyak negara maju, di negara-negara berkembang kebangkitan dan aktivitas partai politik seringkali berkaitan dengan proses pembentukan identitas nasional, pembentukan kerangka sistem politik, pengabsahan lembaga pemerintah, serta usaha-usaha untuk memperkuat persatuan nasional. Dalam kaitan ini partai politik seringkali tidak berfungsi sebagai penyedia akses bagi penyaluran tuntutan yang absah kepada penguasa, tetapi semata-mata sebagai elemen dalam strategi persatuan nasional dan pengontrolan perbedaan pendapat.

Berdasarkan teori-teori di atas maka dapat disimpulkan bahwa Partai politik merupakan organisasi politik yang memiliki ideologi dan cita-cita tertentu yang ingin diraih secara bersama-sama dan memiliki tujuan untuk merebut dan atau mempertahankan kekuasaan dengan cara bersaing dalam pemilu untuk menduduki jabatan-jabatan publik. Partai politik merupakan keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokratis. Sebagai suatu organisasi, partai politik secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara absah (*legitimate*).

2. Pembentukan Partai Politik

Menurut Undang-undang Kepartaian No. 2 Tahun 2011 Pasal 2:

- a. Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 (tiga puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah dari setiap provinsi.
- b. Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang pendiri yang mewakili seluruh pendiri Partai Politik dengan akta notaris.
- c. Pendiri dan pengurus Partai Politik dilarang merangkap sebagai anggota Partai Politik lain.
- d. Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.
- e. Akta notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) harus memuat AD dan ART serta kepengurusan Partai Politik tingkat pusat.
- f. AD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling sedikit:

- 1) Asas dan ciri Partai Politik;
- 2) Visi dan misi Partai Politik;
- 3) Nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik;
- 4) Tujuan dan fungsi Partai Politik;
- 5) Organisasi, tempat kedudukan, dan pengambilan keputusan;
- 6) Kepengurusan Partai Politik;
- 7) Mekanisme rekrutmen keanggotaan Partai Politik dan jabatan politik.
- 8) Sistem kaderisasi.
- 9) Mekanisme pemberhentian anggota Partai Politik.
- 10) Peraturan dan keputusan Partai Politik.
- 11) Pendidikan politik.
- 12) Keuangan Partai Politik
- 13) Mekanisme penyelesaian perselisihan internal Partai Politik.

3. Fungsi Partai Politik

Menurut Ramlan Surbakti (2007. hlm 119), ada tujuh fungsi partai politik yaitu:

- a. Sebagai sarana komunikasi politik. Komunikasi politik ialah proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah. Dalam hal ini, partai politik berfungsi sebagai komunikator politik yang tidak hanya menyampaikan segala keputusan dan penjelasan pemerintah kepada masyarakat sebagaimana diperankan oleh partai politik di negara totaliter tetapi juga menyampaikan aspirasi dan kepentingan berbagai kelompok masyarakat kepada pemerintah. Dalam melaksanakan fungsi ini, partai politik tidak begitu saja menyampaikan segala tuntutan masyarakat kepada pemerintah, tetapi dirumuskan sedemikian rupa sehingga penerima informasi dapat dengan mudah memahami dan memanfaatkan. Jadi dapat dikatakan bahwa partai politik berfungsi untuk mengefektifkan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
- b. Pemadu kepentingan. Keadaan masyarakat modern yang semakin luas dan kompleks membuat banyak ragam pendapat dan aspirasi semakin berkembang. Masing-masing kelompok tentu memiliki banyak keragaman pendapat, sehingga perlu adanya suatu proses yang dinamakan penggabungan kepentingan (*interest aggregation*). Setelah digabungkan, pendapat dan aspirasi tersebut diolah dan dirumuskan dalam bentuk yang lebih teratur. Proses ini dinamakan perumusan kepentingan (*interest articulation*). Agregasi dan artikulasi kepentingan itulah salah satu fungsi dalam

komunikasi partai politik. Setelah itu partai politik merumuskan menjadi usul kebijakan dan memasukkannya dalam program atau *platform* partai untuk diperjuangkan dalam parlemen agar dijadikan sebagai kebijakan umum. Disisi lain, partai politik juga berfungsi memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana dan kebijakan pemerintah. Dalam hal tersebut, partai politik memerankan sebagai penghubung antara yang memerintah dan diperintah.

- c. Sebagai sarana sosialisasi politik. Sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat agar masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung. Proses ini berlangsung seumur hidup yang diperoleh secara sengaja (melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal) maupun tidak sengaja (melalui kontak dan pengalaman sehari-hari, baik dalam kehidupan keluarga dan atau masyarakat). Metode sosialisasi politik dibagi menjadi dua, yakni pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Pendidikan politik merupakan suatu proses dialogik antara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini, masyarakat mengenal dan mempelajari norma-norma, nilai-nilai, simbol-simbol politik negaranya dalam sistem politik, seperti sekolah, pemerintah, dan partai politik. Indoktrinasi politik adalah proses sepihak ketika penguasa memobilisasi dan memanipulasi warga masyarakat untuk menerima nilai-nilai, dan simbol yang dianggap pihak yang berkuasa sebagai hal yang baik dan ideal. Indoktrinasi politik biasa dilakukan di negara dengan sistem totaliter.
- d. Sebagai sarana rekrutmen politik. Rekrutmen politik adalah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Fungsi ini semakin besar porsinya pada negara yang menganut sistem politik totaliter dengan partai politik tunggal atau manakala partai politik ini merupakan partai mayoritas dalam badan perwakilan rakyat. Fungsi rekrutmen merupakan kelanjutan dari fungsi mencari dan mempertahankan kekuasaan. Selain itu, fungsi rekrutmen politik merupakan fungsi yang penting untuk keberlangsungan sebuah sistem politik.
- e. Pengendali konflik. Dalam negara demokrasi, setiap warga negara berhak menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi maupun kepentingannya sehingga konflik merupakan suatu hal yang tidak dapat terelakkan. Partai politik sebagai salah satu lembaga demokrasi berfungsi untuk mengendalikan konflik melalui cara

berdialog dengan pihak-pihak yang berkonflik, menampung dan memadukan berbagai aspirasi dan kepentingan dari pihak-pihak yang berkonflik dan membawa permasalahan ke dalam musyawarah badan perwakilan rakyat untuk mendapatkan penyelesaian berupa keputusan politik.

- f. Partisipasi politik. Partisipasi politik merupakan kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan dalam menentukan pemimpin pemerintahan. Kegiatan yang dimaksud antara lain mengajukan tuntutan, membayar pajak, melaksanakan keputusan, mengajukan kritik dan koreksi atas pelaksanaan suatu kebijakan umum, mendukung dan menentang calon pemimpin tertentu, mengajukan alternatif pemimpin, dan memilih wakil rakyat dalam pemilihan umum. Dalam hal ini, partai politik mempunyai fungsi untuk membuka kesempatan, mendorong, dan mengajak para anggota dan anggota masyarakat yang lain untuk menggunakan partai politik sebagai saluran kegiatan mempengaruhi proses politik.
- g. Fungsi partai politik sebagai kontrol politik. Kontrol politik merupakan kegiatan untuk menunjukkan kesalahan, kelemahan dan penyimpangan dalam suatu kebijakan atau dalam pelaksanaan kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah. Dalam melakukan suatu kontrol politik harus ada tolok ukur yang jelas sehingga kegiatan itu bersifat relatif objektif. Tolok ukur yang dimaksud adalah berupa nilai-nilai politik yang dianggap ideal dan baik (ideologi) yang dijabarkan kedalam berbagai kebijakan atau peraturan perundang-undangan. Tujuan dari kontrol politik yaitu meluruskan kebijakan atau pelaksanaan kebijakan yang menyimpang sehingga kebijakan dan pelaksanaannya dapat sesuai dengan tolok ukur tersebut. Dalam fungsi kontrol, partai politik harus menggunakan tolok ukur yang merupakan kesepakatan bersama sehingga seharusnya menjadi pegangan bersama. Dalam keadaan yang sehat dan demokratis, masyarakat selalu berkembang dan perkembangan itu secara otomatis akan dengan sendirinya memaksa adanya perubahan (transformasi sosial) yang membutuhkan sebuah kontrol. Kontrol yang dilakukan haruslah bersifat terbuka (diketahui dan diterima oleh masyarakat), mendidik, dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan hak dan kewajiban warga negara dalam bernegara seperti yang dikehendaki Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Keterbukaan melakukan kontrol dianggap penting karena menyangkut hak setiap warga negara untuk tahu (*rights to know*)

terhadap apa yang akan terjadi didalam negaranya, karena hal tersebut menyangkut rasa berkebangsaan dan tanggung jawab terhadap perkembangan negara.

Menurut Sigmund Neumann (2006, hlm. 35 dalam *Miriam Budiarjo*)

Fungsi dari parpol terbagi menjadi empat,. Pertama, tugas utama parpol adalah mengatur kehendak umum yang kacau. Partai-partai adalah perantara ide-ide dan selalu menjelaskan, mensistematisasikan dan menerangkan ajaran partai. Partai adalah wakil dari kelompok-kelompok kepentingan sosial, menjembatani jarak yang terdapat antara orang-seorang dan masyarakat luas. Kedua, partai-partai mendorong para pemilih untuk memilih sekurang-kurangnya yang paling kurang buruknya dari dua hal yang buruk, dan dengan demikian memaksakan perbedaan-perbedaan politik disalurkan dalam saluran utama saja atau dikenal dengan pengertian mendidik warga Negara untuk bertanggung jawab secara politik. Ketiga, menjadi penghubung antara pemimpin dan pengikut, merupakan suatu keharusan dalam komunikasi dua arah yang ada dalam system demokrasi itu. Merupakan tugas dari partai untuk menjaga agar saluran komunikasi ini tetap terbuka dan jelas. Tugas seperti itu menjadikan partai, kalau tidak sebagai penguasa, sekurang-kurangnya sebagai pengendali pemerintah dalam suatu Negara demokrasi perwakilan. Keempat, memilih para pemimpin. Di sini sebagaimana juga di tempat-tempat lain dalam Negara demokrasi, pola bersainglah, yaitu memilih antara sekurang-kurangnya dua oligarki, yang menjamin mutu dari kepemimpinan. Pemilihan pemimpin seperti itu tentu saja mengasumsikan adanya suatu public yang mempunyai pikiran terbuka, public yang memnuhi syarat untuk membuat pilihan yang benar, dan adanya suasana intelektual yang cocok untuk berfungsinya partai-partai yang demokratis. Kalau berbagai persyaratan seperti itu suda tidak ada lagi, maka timbullah krisis demokrasi

Menurut Miriam Budiarjo (2001, hlm. 44 dalam *Partisipasi dan Partai Politik Sebuah Bunga Rampai*)

Fungsi parpol terbagi menjadi enam, yaitu :

- Sarana Komunikasi politik. Arus informasi dalam suatu Negara bersifat dua arah artinya berjalan dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas dan disinilah kedudukan parpol dalam arus ini

sebagai jembatan antara “mereka yang memerintah” (*the rulers*) dengan “mereka yang diperintah” (*the Ruled*).

- Artikulasi kepentingan. Di dalam suatu masyarakat modern, apalagi yang luas wilayahnya, pendapatan dan aspirasi seseorang atau suatu kelompok akan hilang tak berbekas apabila tidak ditampung dan disalurkan, pendapat dan sikap yang bermacam-macam itu perlu diolah dan dirumuskan, proses merumuskan kepentingan-kepentingan ini dinamakan artikulasi kepentingan.
- Agregasi kepentingan. Sikap-sikap dan tuntutan-tuntutan dari berbagai-bagai kelompok yang sedikit-banyak menyangkut hal yang sama digabung menjadi satu, proses penggabungan ini dinamakan agregasi kepentingan. Artikulasi kepentingan dan agregasi kepentingan dalam suatu system politik merupakan input yang disampaikan kepada instansi yang berwenang membuat keputusan yang mengikat, dalam hal ini dewan perwakilan rakyat, pemerintah dsb, untuk diolah atau di-“konversi” menjadi output dalam bentuk UU, kebijakan umum, dll, hal ini dikenal dengan program partai.
- Sosialisasi politik. Proses dimana seseorang memperoleh pandangan, orientasi, dan nilai-nilai dari masyarakat di mana ia berada, proses itu juga mencakup proses dimana masyarakat mewariskan norma-norma dan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya.
- Rekrutmen politik. Proses melalui mana partai mencari anggota baru dan mengajak orang yang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik.
- Pengatur konflik. Dalam Negara demokratis yang masyarakatnya bersifat terbuka dan perbedaan dan persaingan pendapat sudah merupakan hal yang wajar. Tetapi dalam masyarakat yang sangat heterogen sifatnya maka perbedaan pendapat ini, apakah ia berdasarkan perbedaan etnis, status, sosial ekonomi atau agama, mudah sekali mengundang konflik. Pertikaian-pertikaian semacam ini dapat diatasi dengan bantuan parpol; sekurang-kurangnya dapat diatur sedemikian rupa, sehingga akibat-akibat negatifnya seminimal mungkin. Namun di pihak lain, dilihat sering kali partai malahan mempertajam pertentangan yang ada

Berdasarkan kenyataannya, tidak semua fungsi partai politik dilaksanakan dalam porsi dan tingkat keberhasilan yang sama. Hal ini tidak hanya bergantung pada sistem politiknya, akan tetapi juga dapat dipengaruhi faktor lain, seperti tingkat dukungan yang diberikan anggota

masyarakat terhadap partai politik (berakar atau tidaknya partai dalam masyarakat), kemampuan adaptasi, kompleksitas organisasi, otonomi, dan kesatuannya.

D. Elektabilitas dan Masyarakat

1. Pengertian Elektabilitas

Menurut Dendy Sugiono (2008, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* hlm. 29) menjelaskan tentang Elektabilitas sebagai berikut:

Elektabilitas adalah tingkat keterpilihan yang disesuaikan dengan kriteria pilihan. Elektabilitas bisa diterapkan kepada barang, jasa maupun orang, badan atau partai. Elektabilitas sering dibicarakan menjelang pemilihan umum. Elektabilitas partai politik berarti tingkat keterpilihan partai politik di publik. Elektabilitas partai tinggi berarti partai tersebut memiliki daya pilih yang tinggi. Untuk meningkatkan elektabilitas maka objek elektabilitas harus memenuhi kriteria keterpilihan dan juga populer. Sedangkan popularitas adalah tingkat keterkenalan di mata public. Meskipun populer belum tentu layak dipilih. Sebaliknya meskipun punya elektabilitas sehingga layak dipilih tapi karena tidak diketahui publik, maka rakyat tidak memilih. Untuk meningkatkan elektabilitas maka sangat tergantung pada teknik kampanye yang dipergunakan. Dalam masyarakat yang belum berkembang, kecocokan profesi tidak menjadi persoalan. Yang perlu diingat, tidak semua kampanye berhasil meningkatkan elektabilitas. Ada kampanye yang menyentuh, ada kampanye yang tidak menyentuh kepentingan rakyat. Sementara itu ada kampanye yang berkedok sebagai survei, dengan tujuan untuk mempengaruhi orang yang sulit membuat keputusan dan sekaligus mematahkan semangat lawan.

2. Konsep Elektabilitas dan Citra Politik

Elektabilitas partai politik dapat kita ukur melalui citranya, sehingga pembahasan mengenai elektabilitas dan citra politik ini dianggap relevan. Elektabilitas Dalam dunia politik terdapat konsep mengenai elektabilitas. Maka, sosok atau institusi yang elektabilitas adalah sosok/institusi yang mendapatkan simpati dan empati dari banyak orang, sehingga orang banyak berkeinginan untuk memilih atau bahkan memilikinya. Popularitas lebih banyak berhubungan dengan dikenalnya seseorang, baik dalam arti positif, ataupun negatif. Dalam masyarakat, sering diartikan, orang yang

populer dianggap mempunyai elektabilitas yang tinggi. Sebaliknya, seorang yang mempunyai elektabilitas tinggi 139 adalah orang yang populer. Memang kedua konstataasi ini ada benarnya. Tapi tidak selalu demikian. Popularitas dan elektabilitas tidak selalu berjalan seiring. Adakalanya berbalikan.

Elektabilitas dijadikan tolok ukur utama suatu keberhasilan, orang atau instansi yang berkualitas tetapi tidak berada dalam lingkaran kekuasaan pun menjadi tersisih. Sebaliknya, mereka yang berada dalam posisi pusat perhatian akan menjadi rebutan. Kondisi ini disuburkan oleh kondisi dan karakteristik masyarakat Indonesia yang sebagian besar belum sadar politik dan berpendidikan rendah serta rendahnya partisipasi politik masyarakat. Ada beberapa indikator utama yang membuat seorang figur dikatakan populer, antara lain, sedang menduduki posisi strategis, sering muncul di berbagai media massa, dan citranya positif dengan karakter dan sikap yang kuat. Pemerintah atau institusi yang berelektabilitas, dengan sendirinya diterima dan didukung oleh mayoritas rakyat, karena mereka mengenal tokohnya secara perseorangan dan mempercayainya secara keseluruhan, bahwa nilai dan kepentingan mereka akan terlindungi serta terpenuhi. Pemerintah dipercaya mampu secara politis dan teknis untuk menangani masalah. Maka, pemerintah menjadi kuat dan berwibawa. Kuat, berarti punya dukungan luas. Berwibawa, berarti diikuti rakyat keputusan atau kebijaksanaannya. Pada gilirannya, dukungan dan wibawa itu mempengaruhi sikap rakyat terhadap cara dan hasil kerja pemerintah dalam melaksanakan tugasnya, termasuk dampaknya kepada penyelesaian masalah kehidupan yang sedang dan akan dihadapinya. Pemerintah yang populer, tetap saja didukung rakyat, sekalipun pelaksanaan tugasnya belum atau tidak cukup berhasil memenuhi nilai dan kepentingan rakyat pendukungnya. Rakyat bersedia menunggu hasil pemecahan masalah yang dijanjikan pemerintah. Menurut pengamat politik dari Universitas Parahyangan Bandung, Asep Warlan Yusuf bahwa elektabilitas tinggi tidak akan berarti apaapa kalau tidak ada faktor pendukung lain. Dukungan partai, data survei internal partai, serta kebijakan partai yang

secara hierarki umumnya harus ditentukan oleh keputusan pengurus di tingkat pusat masing-masing partai. Bila kita memaknai beberapa pengertian elektabilitas yang tertera diatas maka dapat dibuat suatu asumsi bahwa elektabilitas meliputi: perilaku, pribadi, sikap dan persepsi. Perilaku berkaitan dengan tindakan–tindakan yang dilakukan, sedangkan pribadi dan sikap berkaitan dengan perasaan dan emosi, dan persepsi berkaitan dengan tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh manusia. Olehnya itu tingkat elektabilitas dapat diukur dengan memperhatikan unsur pengetahuan ,sikap dan dukungan yang dimiliki oleh kahalayak.

3. Citra Politik

Salah satu konsekuensi kognitif dari komunikasi politik yang sangat penting adalah terbentuknya citra politik yang baik bagi khalayak terhadap politikus atau pemimpin politik atau partai politiknya. Citra politik juga dapat terbentuk dari proses pembelajaran politik ataupun juga sosialisasi politik yang berlangsung terus-menerus. Citra politik terbentuk atau terbangun dari informasi yang kita terima baik langsung maupun melalui media politik termasuk media massa. Citra politik sendiri dapat diartikan sebagai gambaran diri yang ingin diciptakan seorang tokoh masyarakat. Citra politik tersusun melalui persepsi yang bermakna tentang gejala politik, yang kemudian memaknai gejala itu dengan nilai, kepercayaan dan pengharapan yang berangkat dari pendapat pribadi kemudian dikembangkan menjadi pendapat umum. Pemilihan wakil rakyat dan kepala daerah secara langsung telah membuat semakin pentingnya citra seorang figur maupun sebuah partai di mata konstituennya. Kandidat yang akan bertarung akan berusaha semaksimal mungkin membangun citra politiknya di masyarakat, baik melalui media perantara atau terjun langsung ke tengah-tengah masyarakat. Menurut piliang, pencitraan politik adalah sesuatu yang tampak oleh indra tapi tidak memiliki eksistensi substansial karena tertutupan realitas. Ketertutupan substansi tersebut jika berjalan terus-menerus akan menghasilkan implikasi yang kurang baik bagi sistem politik, karena popularitas seorang tokoh atau institusi politik tidak berpijak pada kualitas

politik yang sesungguhnya. Citra politik ini sangat berpengaruh terhadap popularitas seseorang atau sebuah institusi dalam hal ini partai, dimana jika citra seseorang atau partai baik, maka meningkat pula popularitasnya, dalam hal ini semakin baik citra partai tersebut, maka akan semakin banyak yang menyukai dan mendukung partai tersebut. sebaliknya, citra kepopuleran dan simbol yang diciptakan akan jatuh bilamana mendapat serangan politik dari figur maupun partai. Simbol-simbol yang dibangun akan melemah jika telah hadir kekuatan baru yang mampu menandingi kekuatan yang telah dikonstruksi. Dalam hal ini media massa sangat berpengaruh dalam pembentukan citra politik atau membentuk persepsi politik khalayak. Berita politik tentang tokoh politik, partai politik, dan kebijakan politik dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda dan citra politik yang berbeda bagi masing-masing orang. Itulah sebabnya citra politik diartikan sebagai gambaran seseorang tentang realitas politik yang tidak harus sesuai dengan yang sebenarnya.

Citra politik juga berkaitan dengan sosialisasi politik. Karena citra politik terbentuk melalui proses pembelajaran politik, baik secara langsung maupun pengalaman empirik. Sosialisasi politik yang dapat mendorong terbentuknya citra politik dapat mendorong seseorang atau institusi mengambil peran dalam politik dengan berbagai cara. Peningkatan citra merupakan bagian dari perencanaan komunikasi dan sosialisasi.

4. Faktor Meningkatkan Elektabilitas

Elektabilitas adalah tingkat keterpilihan yang disesuaikan dengan kriteria pilihan. Elektabilitas bisa diterapkan kepada barang, jasa maupun orang, badan atau partai. Elektabilitas sering dibicarakan menjelang pemilihan umum. Elektabilitas partai politik berarti tingkat keterpilihan partai politik di publik. Elektabilitas partai tinggi berarti partai tersebut memiliki daya pilih yang tinggi. Untuk meningkatkan elektabilitas maka objek elektabilitas harus memenuhi kriteria keterpilihan dan juga populer. Untuk meningkatkan elektabilitas maka sangat tergantung pada teknik kampanye yang dipergunakan. Dalam masyarakat yang belum

berkembang, kecocokan profesi tidak menjadi persoalan. Yang perlu diingat, tidak semua kampanye berhasil meningkatkan elektabilitas. Ada kampanye yang menyentuh, ada kampanye yang tidak menyentuh kepentingan rakyat. Sementara itu ada kampanye yang berkedok sebagai survei, dengan tujuan untuk mempengaruhi orang yang sulit membuat keputusan dan sekaligus mematahkan semangatlawan. Istilah popularitas dan elektabilitas dalam masyarakat memang sering disamaartikan. Padahal keduanya mempunyai makna dan konotasi yang berbeda, meskipun keduanya mempunyai kedekatan dan korelasi yang besar. Dalam masyarakat, sering diartikan, orang yang populer dianggap mempunyai elektabilitas yang tinggi. Sebaliknya, seorang yang mempunyai elektabilitas tinggi adalah orang yang populer. Popularitas dan elektabilitas tidak selalu berjalan seiring. Orang yang memiliki elektabilitas tinggi adalah orang yang dikenal baik secara meluas dalam masyarakat. Ada orang baik, yang memiliki kinerja tinggi dalam bidang yang ada hubungannya dengan jabatan publik yang ingin dicapai, tapi karena tidak ada yang memperkenalkan menjadi tidak elektabel. Sebaliknya, orang yang berprestasi tinggi dalam bidang yang tidak ada hubungannya dengan jabatan publik, boleh jadi mempunyai elektabilitas tinggi karena ada yang mempopulerkannya secara tepat. Dalam penelitian psikologi sosial telah ditemukan secara luas bahwa informasi mengenai apa yang dilakukan sebagian besar orang mampu mempengaruhi perilaku individu. Salah satu teori yang sering digunakan adalah bandwagon effect. Teori ini berpendangan bahwa individu cenderung mengikuti apa yang dipikirkan dan dilakukan orang lain. Contoh sederhananya adalah orang berama-ramai mendengarkan musik grup band tertentu karena melihat atau mendengar banyak orang mendengarkan music tersebut. Tidak hanya bermanfaat bagi target, band wagon effect juga bermanfaat bagi pelaku karena dapat menjadi self fulfilling prophecy (sebuah prediksi yang secara langsung atau tidak dapat menjadi benar). Keterpilihan seorang kandidat calon Presiden dipengaruhi oleh Perilaku Pemilih. Sesungguhnya untuk melihat perilaku pemilih dalam menentukan pilihan politik mereka

terhadap Calon Presiden maupun Calon Legislatif dapat dipahami dengan beberapa pendekatan. Dekade 1950an, voting behavior ini didasarkan pada melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan sosiologis yang dikembangkan oleh mazhab Colombia (Colombia School of electoral behavior) dan mazhab psikologis yang dikembangkan oleh mazhab Michigan (The Michigan Survey Center). Pendekatan sosiologis ini melihat perilaku memilih dipengaruhi oleh segala kegiatan yang berkonteks sosial. Menurut Afan Gafar (dalam buku *Javanese Voter*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1992 hal 5), pendekatan sosiologis ini melihat tingkah laku pemilih dipengaruhi oleh jenis kelamin, status sosial, lingkungan keluarga, kelompok belajar, teman sepermainan dan juga kepercayaan seseorang. Namun menurutnya analisis mengenai organisasi formal yang diikuti oleh pemilih juga perlu diperhatikan, misalnya serikat buruh, kelompok pengajian dan sebagainya. Intinya, pendekatan sosiologis ini berasumsi bahwa perilaku pemilih dipengaruhi oleh status ekonomi, kelas sosial, agama dan ideologi. Pendekatan psikologis lahir akibat adanya kelemahan dari pendekatan sosiologis. Menurut pendekatan ini, attitude seseorang juga berpengaruh dalam melihat perilaku pemilih. Menurut Dennis Kanvagh pendekatan perilaku pemilih terdapat lima pendekatan, yaitu pendekatan struktural, sosiologis, ekologis, psikologis sosial dan pilihan rasional. Pada pendekatan sosiologis didasarkan pada mobilitas seseorang yang ingin keluar dari kelompok untuk bergabung dengan kelompok lain yang dipengaruhi oleh latar belakang sosial ekonomi, demografi, tempat tinggal, pendidikan, dan pekerjaan. Pendekatan struktural didasarkan pada struktur yang dibangun, artinya pemilih melihat partai politik dari struktur sosial masyarakat, sistem kepartaian dan program yang ditonjolkan partai. Pendekatan ekologis didasarkan pada unit teritorial. Kelompok masyarakat penganut agama, buruh, kelas menengah, suku bangsa (etnis) yang bertempat tinggal di daerah tertentu dapat mempengaruhi perubahan komposisi pemilih terhadap pilihan mereka. Pendekatan pilihan rasional (rational choice) adalah pendekatan yang melihat adanya perhitungan

untung rugi dalam melihat perilaku pemilih. Di sini faktor pendidikan dan kesadaran pemilih sangat berpengaruh. Pendekatan ini dimotori oleh Anthoni Down (1957) yang menyatakan bahwa pemilih bukannya wayang yang tidak memiliki kehendak bebas dari dalangnya dan orientasi pemilih dipengaruhi oleh dua hal utama, yaitu:

- a) Faktor eksternal: Orientasi isu-isu yang berpusat pada pemecahan persoalan yang dihadapi masyarakat dan diangkat menjadi visi, misi, tujuan serta kebijakan program kerja.
- b) Faktor internal: figur dan karakter kandidat melalui pembentukan image berupa citra, reputasi dan kredibilitas tanpa memperhatikan labelpartainya.

Berikut, adalah hasil studi menarik yang dilakukan *Barna Research Group for Election 2012* di Amerika. Grup ini melakukan survey untuk mengetahui faktor elektabilitas apa saja yang mempengaruhi voters (pemilih) mencoblos candidates (calon). Yang paling tinggi prosentasenya adalah isu politik yang digulirkan calon, yaitu sebanyak 83% dari kemungkinan pemilih. Urutan berikutnya adalah karakter (51%). Seterusnya disusul faktor lain seperti afiliasi partai politik calon (17%); pengalaman politik (16%); agama calon (14%); latar belakang pendidikan (6%); kemampuan berbicara (3%); kepribadian (2%); usia (1%); dan penampilan fisik (kurang dari 1%). Hasil dari survey ini menjelaskan kemenangan Obama sebagai incumbent. Sebagian besar voters memilih Obama karena tertarik program kesehatan dan kebijakan pajaknya. Sisi menarik yang patut diulas dari hasil survey ini adalah penempatan isu politik/program calon sebagai determinan utama elektabilitas. Ini menunjukkan tingginya kesadaran masyarakat Amerika dalam berpolitik. Mereka memandang Pemilu sebagai instrument penting demokrasi. Mereka memanfaatkan Pemilu dengan baik untuk memperbaiki nasib bangsa. Karena itu mereka memilih Presiden mumpuni dengan visi jauh kedepan. Tidak satupun dari mereka yang melirik politik pencitraan.

5. Pengertian Masyarakat

Menurut Prof. Dr. H.A.R Tilaar, M.Sc.Ed (1999, hlm. 68 Pendidikan,

Kebudayaan, dan Masyarakat Indonesia)

Masyarakat adalah sekelompok manusia bisa disebut sebagai suatu masyarakat apabila mempunyai pemikiran, perasaan, serta sistem atau aturan yang sama". Dengan kesamaan itu, manusia lalu berhubungan saling berinteraksi antara sesama mereka berdasarkan kepentingan bersama. Masyarakat sering dikelompokkan berdasarkan cara utamanya dalam mencari penghasilan atau kebutuhan hidup. Beberapa ahli ilmu sosial mengelompokkan masyarakat sebagai masyarakat pastoral nomadis, masyarakat pemburu, masyarakat bercocoktanam, dan masyarakat agrikultural intensif disebut juga sebagai masyarakat peradaban. Sebagian pakar beranggapan masyarakat industri dan post-industri sebagai kelompok masyarakat yang terpisah dari kelompok masyarakat *agricultural* tradisional. Masyarakat bisa juga diorganisasikan atas dasar struktur politiknya berdasarkan urutan kompleksitas dan besar, suku, terdapat masyarakat band, *chiefdom*, dan masyarakat negara. Kata *society* berasal dari kata latin, *societas*, yang mempunyai makna hubungan persahabatan dengan yang lain. *Societas* berinduk pada kata *socius* yang memiliki arti teman, sehingga makna *society* berkaitan erat dengan kata sosial. Secara tersirat, kata *society* memiliki kandungan arti bahwa setiap anggotanya mempunyai perhatian dan kepentingan yang sama dalam mencapai tujuan bersama.

E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Joko Susanto dengan judul penelitian PERAN KADERISASI DALAM MENINGKATKAN ELEKTABILITAS PARTAI POLITIK terdapat rumusan masalah dalam penelitian ini adalah
 - a. Bagaimana proses kaderisasi yang dijalankan DPC Partai Gerindra Kota Bandung?
 - b. Apa yang menjadi kendala kaderisasi DPC Partai Gerindra Kota Bandung?
 - c. Bagaimana upaya DPC Partai Gerindra Kota Bandung untuk meningkatkan kualitas kadernya agar sesuai dengan harapan masyarakat?
 - d. Bagaimana kriteria keberhasilan dari pola Kaderisasi yang diterapkan di DPC Kota Bandung untuk meningkatkan Elektabilitas Partai Gerindra?

Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif

dengan penelitian yang bersifat Studi Kasus. Karenanya penulis bertujuan untuk memahami objek yang ditelitinya. Rancangan pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah, Observasi, wawancara, dan Studi Dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

- a. Proses kaderisasi yang dijalankan DPC Partai Gerindra Kota Bandung yaitu DPC hanya mengikuti intruksi DPP yang sudah dijalankan pengkaderan lewat pendidikan di hambalang dalam artian proses kaderisasi Partai Gerindra masih menganut sistem sentralisasi. DPC juga melakukan Kaderisasi dan pelatihan, kegiatanyapun dihadiri oleh pengurus DPC, PAC, Ranting dan sayap partai. Sehingga para kader di DPC Kota Bandung akan memiliki pengetahuan dan wawasan pendidikan politik yang luas, maka dari itu Elektabilitas partai Gerindra akan naik bilamana mempunyai kader yang berkualitas.
- b. Kendala kaderisasi DPC Partai Gerindra Kota Bandung yaitu masih banyak anggota belum sepenuhnya aktif dalam kegiatan partai sehingga terkesan hanya menumpang nama dan sekedar mendapatkan kartu tanda anggota lalu berdampak pada kinerja Partai Gerindra secara keseluruhan. Dan dari SDM dari segi Intelektualitas dalam artian kurang pengetahuan tentang pendidikan politik dan wawasan kebangsaan.
- c. Upaya DPC Partai Gerindra Kota Bandung untuk meningkatkan kualitas kadernya agar sesuai dengan harapan masyarakat yaitu dengan cara mengadakan suatu program yang bersentuhan dengan masyarakat contohnya program pemberdayaan ekonomi, pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan.
- d. Kriteria keberhasilan dari pola Kaderisasi yang diterapkan di DPC Kota Bandung untuk meningkatkan Elektabilitas Partai Gerindra yaitu bahwa Dikatan proses kaderisasi berhasil apabila mampu mengangkat elektabilitas partai itu sendiri, contohnya memenangkan Ridwan Kamil dalam Pemilihan Walikota Bandung

yang di usung oleh Partai Gerindra Kota Bandung, selain itu ada peningkatan kursi DPRD Kota Bandung yang tadinya 3 Kursi menjadi 7 kursi. Kata kunci: Kaderisasi, Elektabilitas dan Partai Politik.

F. Kerangka Pemikiran

Partai politik tidak bisa dilepaskan dengan proses Kaderisasi di dalamnya. Menurut Miriam Budiardjo, apabila partai memiliki kader-kader yang baik dan berkualitas, maka partai tersebut akan mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri. Hal tersebut menjadi sangat penting karena dengan memiliki kader yang baik, maka partai tersebut tidak akan kesulitan dalam menentukan pemimpinnya sendiri dan memiliki peluang untuk mengajukan calon ke bursa kepemimpinan nasional. Selain itu, kaderisasi politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjangkau dan melatih calon-calon pemimpin. Ada berbagai cara yang dapat dilakukan dalam Kaderisasi politik, antara lain melalui kontak pribadi, persuasi, ataupun cara-cara lainnya.

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat dikembangkan dalam kerangka pemikiran sebagai berikut.

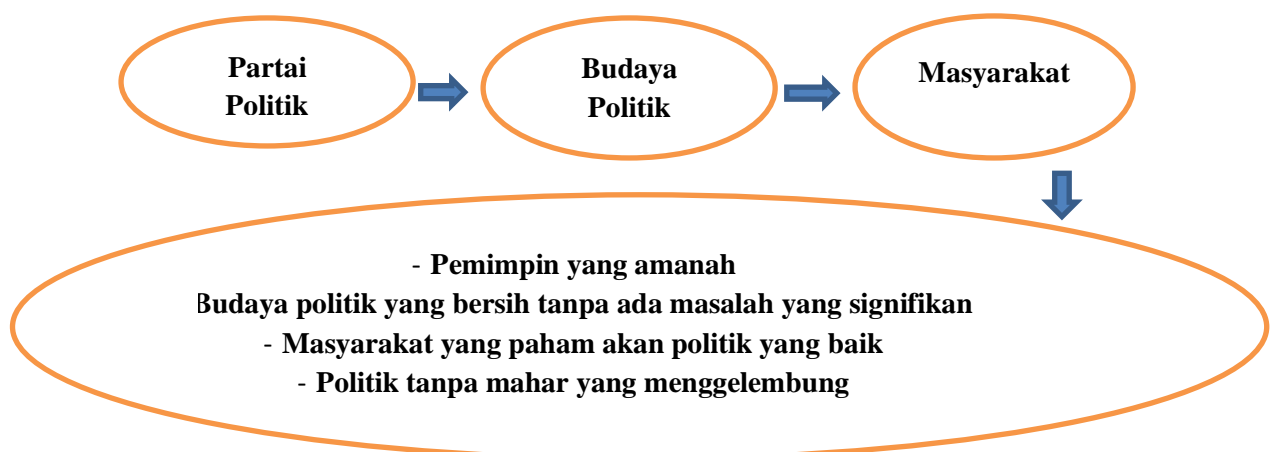
1. Budaya politik sehat adalah upaya pelestarian budaya politik secara turun temurun dan ini adalah suatu hal yang harus dirawat dijaga dan dilestarikan dan sifatnya turun-temurun, apalagi di Negara kita ini yang sangat banyak ragam budaya nya sangat disayangkan jika kita tidak merawat kekayaan budaya kita, dan kali ini saya tertarik dengan salah satu budaya dimana budaya ini salah satu penyokong kemajuan bangsa kita yaitu budaya politik yang sehat.
2. Indonesia dinilai mempunyai budaya politik yang bagus, tetapi banyak indikator pencapaiannya untuk mencapai kata bagus salah satunya adalah politik yang bersih. Politik yang bersih harus

dilestarikan baik dari lembaga politik (Partai Politik), lembaga pendidikan, serta lembaga pemerintahan.

Politik yang bersih adalah politik sebagai berikut :

- a) Tidak mengeluarkan ongkos politik yang menggelembung.
 - b) Tidak saling menjatuhkan lawan secara fisik ataupun isu tidak jelas apalagi isu SARA
 - c) Menerima kekalahan dan kemenangan dengan lapang dada tanpa ada masalah berkelanjutan
 - d) Menggunakan tahapan politik sesuai prosedural
4. Salah satu unsur yang sangat bertanggung jawab adalah partai politik, partai politik adalah ujung tombak baik atau buruknya politik di suatu Negara. Ketika seseorang berkeinginan untuk mengaktualisasikan hasil pembelajaran politik dalam ruang lingkup akademis partai politik lah yang harus dituju sebagai ranah aktualisasi yang tepat untuk berpolitik.
5. Budaya politik sehat yang diajarkan kepada masyarakat dengan proses aktualisasi penerapan berpolitik sesuai karakteristik partai politik masing-masing haruslah dapat meningkatkan elektabilitas partai politiknya, dan *multy player efect* bagi masyarakatnya dapat terus meneruskan budaya politik yang sehat, bersih, dan amanah. Dan bagi kelangsungan Negara ini akan muncul pemimpin – pemimpin yang dapat memimpin Negara dengan baik dan amanah.

Maka Dapat dirumuskan kedalam Bagan berikut ini :



Gambar: 2.1 Kerangka Pemikiran

Sumber : Di desain oleh Peneliti

G. Asumsi dan Hipotesis

1. Asumsi

Dalam hal ini peneliti harus dapat memberikan sederetan asumsi yang kuat tentang kedudukan permasalahan yang sedang diteliti. Asumsi yang harus diberikan tersebut, diberi nama asumsi dasar atau anggapan dasar. Anggapan dasar ini merupakan landasan teori di dalam pelaporan hasil penelitian nanti.

- a. Budaya politik sehat adalah upaya pelestarian budaya politik secara turun temurun dan ini adalah suatu hal yang harus dirawat dijaga dan dilestarikan dan sifatnya turun-temurun, budaya ini salah satu penyokong kemajuan bangsa kita yaitu budaya politik yang sehat.
- b. Indonesia dinilai mempunyai budaya politik yang bagus, tetapi banyak indikator pencapaiannya untuk mencapai kata bagus salah satunya adalah politik yang bersih. Politik yang bersih harus dilestarikan baik dari lembaga politik (Partai Politik), lembaga pendidikan, serta lembaga pemerintahan
- c. Budaya politik sehat yang diajarkan kepada masyarakat dengan proses aktualisasi penerapan berpolitik sesuai karakteristik partai politik masing-masing.

2. Hipotesis

- a. Jika peneliti mampu mengolah data dari pendidikan budaya politik sehat yang di kembangkan oleh partai politik terhadap kadernya dan bagi masyarakat maka akan timbul sinkronisasi antara pendidik budaya politik dan pelaksana teknis politik atau bisa

disebut ranah aktualisasi setelah mengenyam pendidikan budaya politik.

- b. Jika ini dilaksanakan dengan baik maka akan terlihat letak kesalahan antara pendidik politik dan pelaksana politik yang ada di Negara ini khususnya di Kota Bandung.
- c. Jika pola politik yang dilakukan oleh partai politik sudah bagus, baik, dan benar maka haruslah dapat meningkatkan elektabilitas partai politiknya, dan *multy player efect* bagi masyarakatnya dapat terus meneruskan budaya politik yang sehat, bersih, dan amanah. Dan bagi kelangsungan Negara ini akan muncul pemimpin – pemimpin yang dapat memimpin Negara dengan baik dan amanah